



Kejari Isyaratkan Tersangka Bertambah

Dugaan Korupsi Pupuk Rp 800 Juta

Pemeriksaan tahap selanjutnya guna menguatkan status kedua tersangka, dan mencari tahu ke mana aliran uang Rp 800 juta yang diduga dikorupsi.



● NUSABALI/NANTRA

Kajari Amlapura Ivan Jaka (kanan) dan Kasi Pidsus Aditya Okto.

AMLAPURA, NusaBali

Penanganan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan pupuk senilai Rp 800 juta yang telah menjerat dua tersangka dari pejabat dan rekanan, terus bergulir dan melebar. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Amlapura mengisyaratkan bakal ada tambahan tersangka menyusul pemeriksaan tahap berikutnya yang akan segera digelar pekan depan.

Kepala Kejari Amlapura Ivan Jaka, didampingi Kasi Pidsus Kejari Amlapura Aditya Okto Thohari menyebutkan, bisa saja ada tambahan tersangka kasus. Sebab, penyidikan

tahap awal baru menjerat dua tersangka. Pemeriksaan berikutnya, masih memanggil minimal 10 saksi dilakukan mulai Senin (25/5).

Ivan Jaka yang dikonfirmasi menjelaskan, tahap berikutnya memeriksa saksi-saksi sebanyak mungkin, guna menguatkan status kedua tersangka, dan mengembangkan kasus itu, ke mana arah aliran uang yang diduga dikorupsi, hal itu diutarakan, di Amlapura, Rabu (20/5).

"Makanya masih dalam

pengembangan, kemungkinan saja, jumlah tersangka bertambah, tunggu saja hasil pemeriksaan saksi-saksi," kata Ivan Jaka. Sebelumnya, Kejari Amlapura menetapkan dua tersangka utama, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Karangasem I Komang Subratayasa, dan rekanan, Hamdani.

Subratayasa katanya, berperan aktif membagi-bagikan proyek kepada lima rekanan yang mestinya proyek itu ditenderkan, justru dijadikan penunjukan. Lagi pula

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 8



harga pupuk per kilogram Rp 400, ditambah ongkos kirim Rp 200, total harga Rp 600 per kilogram pembeliannya di Kabupaten Banyuwangi, Jatim, dan diterima di Amlapura.

Kenyataannya pembelian menggunakan lima rekanan yang dikuasai satu orang per kilogram Rp 2.000, berarti ada selisih Rp 1.400 per kilogram. "Bisa saja proyek itu berubah jadi penunjukan yang total nilai Rp 800 juta, tetapi jangan untuk rekanan belum berpengalaman. Berikan rekanan yang telah berpengalaman, dan setiap rekanan pemiliknya beda-beda. Kali ini yang terjadi yang mendapatkan penunjukan lima rekanan, satu pemilik," katanya.

Rekanan itu kata Kajari Amlapura, berdiri tahun 2012, dan dapat proyek tahun 2013. "Berarti tidak punya pengalaman, dan tidak memberdayakan UKM. Sesuai Keppres No 80 tahun 2003, boleh saja jadi penunjukan, asalkan yang sebagian rekanan berpengalaman, dan pemilik perusahaan beda-beda," tambahnya lagi.

Penyelidikan berlangsung sejak sebulan terakhir, mengungkap

dana Rp 800 juta untuk pengadaan pupuk, yang mestinya ditenderkan, justru diberlakukan penunjukan, dengan siasat, memecah dana itu menjadi lima paket, sehingga nilainya rata-rata di bawah Rp 200 juta. Cara itu untuk menyiasati diberlakukannya Keppres No 80 tahun 2003, tentang pedoman pelaksana pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Subratayasa itu sendiri sebenarnya jadi tersangka selaku kuasa pengguna anggaran dan PPK (pejabat pembuat komitmen) semasih jadi Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Karangasem tahun 2013.

Dana Rp 800 juta turun di APBD 2013, terbagi dua tahap, di APBD induk Rp 500 juta dan APBD Perubahan 2013, Rp 300 juta. Lagi pula, teknis pemanfaatan dana itu mirip kasus pengadaan bibit di Dinas Hutbun, sehingga menjerat dua terpidana.

Sebab, munculnya dan Rp 800 juta, tanpa diawali usulan kelompok tani melalui proposal. Dana tersebut terlebih dahulu ada, selanjutnya pencairannya melalui proses pengajuan proposal. **k16**

Edisi : Ramis 21 Mei 2015

Hal : 8



Puskop Jagadhita Minta Dana Bergulir Dilanjutkan

★ Dihentikan oleh Pemkab Badung karena Jadi Temuan BPK

MANGUPURA, NusaBali

Pengurus sejumlah koperasi yang ada di Kabupaten Badung yang bernaung di bawah Pusat Koperasi (Puskop) Jagadhita datang ke Puspem Badung, Rabu (20/5) sekitar pukul 10.00 Wita. Kedatangan mereka dalam rangka menyampaikan aspirasi agar dana bergulir kepada Koperasi Jagadhita dapat diteruskan. Karena dengan support dana dari pemerintah penyaluran kredit kepada masyarakat bisa optimal.

Di lain pihak mereka juga menyoroti mengapa Pemkab Badung melakukan penyertaan modal ke PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, padahal keberadaan koperasi dinilai lebih membutuhkan untuk penguatan modal koperasi dan UMKM. Karenanya, bersamaan dengan itu koperasi rimer yang bernaung di bawah

Puskop Jagadhita meminta perhatian dari pemerintah, salah satunya yang diminta adalah pemberian dana bergulir yang sebelumnya telah dilakukan.

"Intinya agar dana bergulir kepada Puskop Jagadhita dapat diteruskan dengan tanpa menarik kembali dana bergulir yang selama ini telah dimanfaatkan oleh Pusat Koperasi Jagadhita. Hal ini karena dana bergulir tersebut sangat dibutuhkan untuk penguatan modal koperasi," harap Ketua Puskop Jagadhita Badung Alit Suarsawan.

Menurut dia dana bergulir tersebut sudah pernah dilakukan pemerintah sebetulnya dari tahun 2004 sampai 2010. "Dana bergulir itu dikucurkan kepada seluruh anggota Puskop Jagadhita, besarnya Rp 100 juta," ungkap Suarsawan. Tetapi, sejak ada

permasalahan sampai kemudian menjadi temuan BPK RI, seketika itu pengucuran dana dihentikan sampai sekarang.

Untuk itu, kini pihaknya berharap agar pemerintah kembali mengucurkan dana bergulir tersebut. Sehingga dapat membantu permodalan koperasi di Badung.

Menjawab tuntutan tersebut, Sekkab Badung Kompyang R Swandika menegaskan tidak akan mencairkan dana bergulir lagi, sepanjang masalah tertib administrasi yang menjadi temuan BPK tidak dibenahi dan diselesaikan. "Penghentian dana bergulir sebesar Rp 9 miliar ke Puskop Jagadhita ini karena sepenuhnya dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK atas pengelolaan dana bergulir yang dinilai tidak tertib administrasi dan

berpotensi terjadinya persoalan hukum," tandas Swandika.

Selama ini, lanjutnya, sesungguhnya tidak ada hambatan komunikasi antara Pemkab Badung dengan Puskop Jagadhita. Bahkan Bupati Badung selalu hadir bersama Gerakan Koperasi melalui Kadisperindagkop secara berkala melakukan pembinaan, pengawasan, dan mengatensi baik koperasi yang sehat maupun koperasi yang dinilai tidak sehat.

Walaupun demikian, pemerintah daerah di sisi yang lain memiliki komitmen bagaimana jangan sampai bantuan yang dikucurkan menimbulkan kasus jeratan hukum di kemudian hari. "Jadi ini kami pegang teguh jangan sampai kami memberikan bantuan sehingga akhirnya terjerat masalah hukum," kata Swandika.

Menurut pejabat asal Kerobokan, itu selama ini Pemkab Badung memiliki komitmen yang sama dengan gerakan koperasi, yakni bagaimana kebijakan yang pro rakyat dan menempatkan koperasi sebagai pilar perkembangan ekonomi kerakyatan di Badung. "APBD Badung adalah pro rakyat dan berpihak kepada koperasi untuk membesarkan koperasi menuju kesejahteraan masyarakat. Tetapi Pemkab Badung taat asas dan taat norma, taat prosedur dan tunduk pada moral justis, serta asas manfaat," tandasnya.

Di bagian lainnya Kepala Diskoperindag I Ketut Karpiana mengungkapkan dari Rp 9 miliar dana bergulir tersebut baru Rp 5 miliar yang dikembalikan ke kas daerah, sisanya masih Rp 4 miliar masih di Puskop Jagadhita. as

Edisi : Kamis, 21 Mei 2015

Hal : 12